

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Bisnis Indonesia

Wilayah Berita : Kabupaten Kudus

Halaman 10

## Piutang RSUD Kudus Capai Rp23 Miliar

● NENI RIDARINENI

### Jumlah piutang terbesar berasal dari program JKN-KIS.

KUDUS — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memiliki piutang belum terbayar dari tagihan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta program pengobatan gratis kelas III. Angkanya mencapai Rp 23 miliar.

Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus, Abdul Azis Achyar, menjelaskan piutang terbesar berasal dari program JKN-KIS dengan operator BPJS Kesehatan. Sementara piutang dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus melalui program kelas III gratis, setelah ada pelunasan berkurang menjadi Rp 6,5 miliar.

Ia berharap, piutang tersebut bisa segera terbayarkan, terutama dari BPJS Kesehatan yang biasanya membayar tagihan setelah pengajuan akan cair dalam jangka waktu 15 hari kerja. "Jika klaim JKN-KIS terbayarkan, tentunya piutang RSUD Kudus semakin berkurang," ujarnya, Jumat (22/12).

Diperkirakan, klaim terhadap BPJS Kesehatan segera terbayarkan, karena selama ini memang terbayarkan setelah ada pengajuan. Setiap tahunnya, lanjut dia, RSUD Kudus juga mempersiapkan biaya operasionalnya, sehingga ada tidaknya tunggakan tidak memengaruhi pelayanan di rumah sakit itu.

Menurutnya, dalam setahun, anggaran yang disiapkan RSUD Kudus biasanya sekitar Rp 15 miliar, sedangkan untuk saat ini justru tersedia dana hingga Rp 20 miliar. "Untuk itu, kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga dan tidak terkendala dengan tagihan yang belum terbayarkan," kata dia.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabu-

paten Kudus dalam mengusulkan anggaran untuk program pengobatan gratis di ruang kelas III pada 2018 justru hanya disetujui Rp 9 miliar dari semula saat pembahasan sempat diusulkan Rp 21 miliar. "Anggaran sebesar Rp 9 miliar memang minim, karena tagihan pengobatan gratis dari RSUD Kudus untuk tahun ini saja mencapai Rp 7 miliar," ujar Kepala DKK Joko Dwi Putranto.

Dana sebesar Rp 9 miliar, kata dia, juga diperuntukkan bagi anggaran puskesmas di Kudus yang kebutuhannya berkisar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun. Terkait kekurangannya, kata dia, DKK akan mengusulkan kembali melalui APBD Perubahan 2018.

Sebelumnya, di DI Yogyakarta, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Janoe Tegoeh Prasetijo, mengungkapkan tagihan RSUP Dr Sardjito ke BPJS Kesehatan yang sudah diverifikasi dan belum terbayarkan sebesar Rp 84 miliar.

Menurut dia, dari Rp 84 miliar terdiri dari Rp 41 miliar segera dibayarkan menunggu dropping dari BPJS Pusat karena jatuh temponya November dan Rp 43 miliar baru diajukan 20 November lalu.

"Jatuh tempo pembayaran 15 hari setelah diajukan. Biasanya tagihan BPJS dari rumah sakit setelah diverifikasi di upload ke pusat. Selama ini pembayaran BPJS ke rumah sakit lancar, tetapi tentu saja setelah persyaratan administrasi lengkap dan sudah diverifikasi oleh BPJS," kata Janoe.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Hukum RSUP Dr Sardjito Trisno Heru Nugroho mengungkapkan tagihan RSUP Dr Sardjito ke BPJS Kesehatan per 10 November 2017 yang belum dibayarkan sebesar Rp 143 miliar.

Tagihan tersebut, paparnya, belum terbayarkan karena administrasi belum lengkap dan masalah internal rumah sakit dan BPJS. Menurut Heru, sapaan akrab Trisno Heru Nugroho, uang dari BPJS itu merupakan salah satu pendapatan dari RSUP Dr Sardjito yang menjadi BLU (Badan Layanan Umum). ■ antara ed : yusuf assidiq